

Resume Skripsi
STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PESISIR (PEMP) STUDI KASUS MASYARAKAT PESISIR KELURAHAN
TANJUNGMAS KOTA SEMARANG

IGIT SUYANTO
(D2A 002 037)

Harmonization of development fishery and ocean sector as one moving spirit economic wriggle that faced with the paradocs fisherman poverty, some condition was so ironics where the coastal society is marginaled in the middle overflow fishery resources on Indonesian territory. Constain economic scale was token by capital weakness in the fishery sector and limited acces to capital effort for coastal society and needed some integral development strategic in economic social system for the coastal society. PEMP as policy product with the government intrvention try based the developed beach strategic have base from empowerment society with concentration in distribution services acces about micro finance for the coastal society. The research about an PEMP program in Tanjungmas the variable was token is attitude variable and communication variable as independent variable, besides implementation variable as dependent variable.

Key word : PEMP, attitude, communication, implementation.

PENDAHULUAN

Sejak dulu program pemberdayaan nelayan dan pesisir belumlah tergarap secara proporsional. Pemanfaatan sumber daya alam kelautan masih dilakukan secara

parsial dan kurang didukung oleh teknologi yang tepat guna sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal. Kenyataan tersebut berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang tergolong rendah bahkan sebagian hidup dalam garis kemiskinan.

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan No.18 Tahun 2004 tentang pedoman umum pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), mencoba meletakkan kembali dasar-dasar pengembangan kawasan pesisir dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan dalam ekonomi menurut Kieffer (1981) adalah meningkatkan kemampuan individu untuk berubah, diarahkan untuk adanya akses terhadap pelayanan keuangan mikro, akses terhadap pendapatan, akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga dan akses terhadap pasar.

Secara umum program PEMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan dengan prioritas pengelolaan dan pembudidayaan skala kecil dengan sasaran :

1. Meningkatkan akses permodalan melalui pengembangan jaringan lembaga keuangan mikro mina yang mandiri sesuai dengan karakteristik local.
2. Terfasilitasinya implementasi teknologi tepat guna dalam rangka optimalisasi pemanfaatan SDA
3. Berkembangnya jaringan informasi usaha, permodalan dan pemasaran

4. Meningkatkan kualitas SDM pesisir dalam manajemen usaha dan pemanfaatan SDM

Pada tingkatan mikro aspek kelembagaan lebih dikenal sebagai suatu *institutional arrangement* yang lebih mengedepankan institusi pemerintah. Dalam konteks perikanan dan kelautan lembaga terkait berperan penting dalam mengatur mekanisme alokasi sumber daya yang bersifat khusus. Dalam organisasi dan kelembagaan PEMP ada 5 (lima) pihak yang terlibat didalamnya, yaitu :

1. Pemerintah, yang terdiri atas departemen kelautan dan perikanan dan dinas propinsi atau kabupaten kota yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan
2. Konsultan Manajemen, terdiri atas LSM, akademisi atau perusahaan jasa konsultasi yang ditunjuk oleh kepala daerah melalui kepala dinas kabupaten/kota
3. Tenaga pendamping desa (TPD), dalam tugasnya TPD meliputi mendampingi masyarakat pesisir untuk mengakses dana ekonomi produktif, pendampingan teknis dan manajemen usaha, membantu masyarakat pesisir dalam mengakses modal usaha yang bersumber dari perbankan.
4. Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3), koperasi ini berperan sebagai penerima Dana Ekonomi Produktif (DEP) sebagai modal koperasi yang pengelolaannya diserahkan kepada Swamitra Mina milik koperasi yang bersangkutan atau Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) pesisir yang sahamnya juga dimiliki oleh koperasi tersebut.

Sasaran program seperti yang tertuang dalam Kepmen No. 18 tahun 2004 adalah masyarakat pesisir miskin. Masyarakat pesisir miskin yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pedagang hasil perikanan serta usaha-usaha yang berkaitan dengan perikanan kelautan. Namun kondisi di lapangan berdasarkan observasi menunjukkan bahwa yang memanfaatkan kredit adalah mereka yang tidak miskin. Peserta program memang tergolong miskin tetapi masyarakat yang tergolong sangat miskin justru tidak satupun yang pernah menerima bantuan kredit.

Dalam beberapa kasus, dana pinjaman ternyata tidak digunakan untuk modal usaha tetapi digunakan untuk membiayai pendidikan anak, membangun rumah atau memenuhi kewajiban lain. Selain itu adanya persepsi bahwa bantuan pemerintah merupakan hibah menyebabkan masyarakat enggan mengembalikan pinjaman secara teratur. Di sisi lain meskipun kelayakan usaha dan kemampuan peminjam untuk mencicil menjadi pertimbangan dalam menentukan sasaran program, tingkat pengembalian umumnya masih kecil dan cenderung bervariasi antar bidang usaha. Pemilik usaha kios atau usaha dagang merupakan sasaran program yang dinilai memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit tepat waktu. Hasil produksi yang tidak menentu dan harga jual yang fluktuatif menjadi alasan bagi nelayan tidak mampu mengembalikan pinjaman. Laporan DKP kota Semarang menyebutkan tingkat pengembalian pinjaman nelayan masih berkisar 30% dari modal yang digulirkan koperasi LEPP-M3.

Pentingnya komunikasi antara masyarakat dengan petugas harus diwujudkan dalam upaya untuk memberdayakan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah sendiri membuat program kurang berkembang dan penyerapan dana belum maksimal. Selain itu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui betul bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam proses penyaluran pinjaman sehingga tidak ada persamaan persepsi dan sikap dari kedua belah pihak dalam tercapainya implementasi kebijakan PEMP.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah :

1. Apakah ada pengaruh variabel sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
2. Apakah ada pengaruh variabel komunikasi terhadap implementasi kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh variabel sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
- b. Untuk mengetahui pengaruh variabel komunikasi terhadap implementasi kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
- c. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel sikap dan variabel komunikasi terhadap implementasi kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Kerangka Teori

Edward III mengemukakan bahwa salah satu pendekatan dalam studi implementasi adalah harus dimulainya pertanyaan apakah yang menjadi syarat dan selanjutnya Edward menentukan empat faktor yang mempengaruhinya, (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi atau sikap, (4) Struktur Birokrasi. Keempat variabel ini saling berhubungan satu sama lain.

Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kejelasan standar dan sasaran tidak akan menjamin implementasi efektif bila tidak adanya komunikasi antar organisasi dan aktivitas penyuluhan. Hal ini berkaitan erat dengan struktur birokrasi dari pelaksana. Menurut Metern dan Horn ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, (1) Standar dan Sasaran Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik, (4) Karakteristik Tujuan, (5) Komunikasi Antar Organisasi, (6) Sikap Pelaksana.

Grindle mengemukakan bahwa ada dua variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu isi kebijakan dan konteks dari implementasi. Mengingat pemahaman Grindle tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan ditentukan oleh banyak hal, terutama yang menyangkut kepentingan-kepentingan yang terlibat didalamnya. Artinya sebuah kebijakan yang sederhana tentu tidak melibatkan kepentingan banyak orang, kelompok dalam masyarakat sehingga tidak akan membawa perubahan yang besar.

Sebaliknya semakin melibatkan banyak kepentingan, maka keterlibatan seseorang atau kelompok dalam implementasi kebijakan tersebut akan sangat tergantung apakah kepentingannya terlindungi atau bahkan orang atau kelompok tersebut akan memperoleh manfaat yang tinggi atau tidak mendapatkannya.

Dari semua variabel-variabel yang telah dipaparkan oleh para ahli mempunyai kesamaan terutama yang menyoroti tentang komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan aplikasi dari model George C Edward III dan Van Meter Van Horn yang dianggap representatif untuk menggambarkan Implementasi Kebijakan PEMP Desa Tanjungmas kecamatan Semarang Utara dengan faktor sikap dan faktor komunikasi yang dijadikan variabel dalam penelitian.

Sikap pelaksana adalah faktor ketiga dalam implementasi menurut Edward III. Sikap dapat dilihat dari sikap pelaksana kebijakan dan sikap dari penerima kebijakan. Bila pelaksana bersikap baik maka, ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik juga, sehingga penerima kebijakan yakni masyarakat pesisir memiliki sikap yang baik dalam menjalankan kebijakan yang ada. Kaitannya dalam penelitian ini, peneliti melihat sikap dari penerima kebijakan yaitu masyarakat Desa Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara. Sikap ini dilihat dari masyarakat pesisir dalam mensikapi implementasi kebijakan PEMP yang berlangsung.

Komunikasi merupakan syarat pertama bagi implementasi yang efektif karena dengan adanya komunikasi mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Adanya komunikasi yang jelas maka para pelaksana

dan penerima kebijakan dapat memahami apa yang diidealkan oleh suatu kebijakan, seperti apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Hanya saja komunikasi adalah proses yang rumit, yang sangat potensial untuk terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu perlu adanya pentransmisian kebijakan yang akurat dan cermat terhadap kelompok sasaran yaitu masyarakat pesisir, sehingga kaitannya dengan penelitian ini bahwa implementasi kebijakan PEMP membutuhkan suatu pentransmisian kebijakan yang jelas berdasar pada petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang ada yaitu Keputusan Menteri Kelautan No.18 tahun 2004. Para pelaksana harus mengetahui dan memahami petunjuk-petunjuk yang telah digariskan dari pusat sehingga dalam pelaksanaannya dinas-dinas pelaksanan yang terkait dalam implementasi kebijakan PEMP dapat mentransmisikan tujuan dan sasaran kebijakan kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat pesisir dan nelayan khususnya masyarakat pesisir Desa Tanjungmas.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang *eksplanatory* yaitu untuk mencari hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Di dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah anggota masyarakat pesisir yang menjadi peneriman PEMP di Desa Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara.

b. Sampel penelitian

1. Elemen Penelitian

Merupakan satuan terkecil yang akan diteliti atributnya. Elemen penelitian disini adalah seluruh masyarakat desa Tanjungmas penerima pinjaman PEMP.

2. Kerangka Sampel

Merupakan daftar dari seluruh elemen penelitian. Kerangka sampel dalam penelitian ini adalah daftar nama masyarakat desa Tanjungmas penerima pinjaman PEMP yang menjadi elemen penelitian.

3. Pecahan Sampel

Merupakan pemecahan unsur-unsur sampel menjadi bagian yang lebih kecil sehingga nampak masing-masing bagian diwakili oleh beberapa penduduk Desa Tanjungmas penerima pinjaman PEMP.

4. Ukuran Sampel

Merupakan besarnya sampel yang akan diteliti, dinyatakan dalam prosentase kemudian dihitung besar nilainya. Untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi, para ahli mengemukakan bermacam-macam cara. Penulis berdasarkan pengambilan ukuran sampel pada pendapat Slovin (Husein Umar, 1997,107), yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

N = Ukuran populasi

n = Jumlah sampel

e = Persentase kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau di inginkan.

Pemakaian rumus diatas mempunyai asumsi bahwa populasi berdistribusi normal. Persentase kelonggaran ketidakteelitian yang bisa dipakai antara 1%-15% , penulis memilih persen kelonggaran sebesar 15%. Ini didasarkan pada jumlah populasi penerima pinjaman dana PEMP di Desa Tanjungmas sebesar 56 orang, dimana tingkat homogenitas populasi yang tinggi, sehingga beberapa sampel cukup untuk mewakili yang lain.

Berdasarkan rumus diatas maka jumlah sample yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{56}{1 + 56(15\%)^2}$$

$$n = \frac{56}{1 + 0,56}$$

$$n = 35,89 \text{ jika dibulatkan } n = 36$$

e. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam teknik pengambilan sampel, peneliti tidak memilih-milih individu tetapi diambil secara acak sehingga semua individu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Jadi teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah random sampling.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Ø Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih jelas.
- Ø Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan responden. Dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Semarang (dibantu dengan Subdin yang menagani program PEMP)
- Ø Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang disampaikan secara tertulis berbentuk pertanyaan terbuka dan tertutup, juga kombinasi antara pertanyaan terbuka dan tertutup.
- Ø Studi Pustaka adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan sejumlah teori dan informasi yang erat hubungannya dengan materi peneliti. Hal ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, majalah dan sumber-sumber lainnya.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik :

a. Analisis data kualitatif

Teknik ini dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis. Analisis kualitatif dimaksudkan untuk memperdalam analisis kuantitatif.

b. Analisis Data Kuantitatif

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan dan tabel-tabel yang telah dipersiapkan, yang berasal dari data kuesioner jawaban responden.

HASIL PENELITIAN

Rekapitulasi Data Variabel Implementasi Kebijakan

No.	Kategori Jawaban	F	%
1.	Sangat tinggi	1	2,77
2.	Tinggi	8	22,22
3.	Kurang tinggi	24	66,7
4.	Rendah	3	8,33
	Jumlah	36	100

Sumber : diolah dari tabel III. 15

Berdasarkan pengolahan data dalam tabel III. 16 maka dapat diketahui bahwa implementasi program PEMP diperoleh hasil kurang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari 36 responden, 1 responden (10,81%) menjawab dengan kategori sangat tinggi, 4 responden (10,81%) menjawab dengan kategori tinggi, 12 responden (32,43%)

menjawab dengan kategori kurang tinggi dan 17 responden (45,95%) menjawab dengan kategori rendah.

Beberepa data mengungkapkan implementasi program walaupun telah berjalan namun memiliki banyak benturan dalam pelaksanaannya. Prosedur dan aksesibiliti yang ditawarkan belum maksimal bahkan sangat minim. Penggunaan dana pinjaman bervariasi antar responden, sebagian digunakan untuk modal usaha namun lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain walaupun untuk melunasi pinjaman mengendalkan hasil usaha. Penggunaan agunan secara signifikan membatasi akses bagi nelayan miskin yang mengandalkan hidup pada alam sehingga untuk kelancaran pembayaran mereka mengandalkan dana yang berasal dari tengkulak. Walaupun pada prinsipnya layanan program ditujukan bagi golongan pesisir namun tidak berarti layanan keuangan mikro tersebut sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh keluarga masyarakat pesisir.

Rekapitulasi Data Variabel Sikap

No.	Kategori Jawaban	F	%
1.	Sangat tinggi	2	5,77
2.	Tinggi	9	25
3.	Kurang tinggi	22	61,11
4.	Rendah	3	8,33
	Jumlah	36	100

Sumber : diolah dari tabel III. 26

Berdasarkan pengolahan data dalam tabel III. 27 maka dapat diketahui bahwa sikap dalam program PEMP diperoleh hasil rendah. Hal ini dapat dilihat dari 36

responden, 2 responden (5,77%) menjawab dengan kategori sangat tinggi, 9 responden (25%) menjawab dengan kategori tinggi, 22 responden (61,11%) menjawab dengan kategori kurang tinggi, dan 3 responden (8,33%) menjawab dengan kategori rendah.

Responden beranggapan bahwa petugas telah meakukan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada, telah mau mendengarkan keluhan-keluhan dan mencurahkan perhatian pada permasalahan kaum pesisir. Petugas telah menunjukkan kesediaannya dalam melakukan tugas, jika ada pengajuan kredit usaha petugas dalam hitungan hari melakukan survei dan mewawanca kepada calon peminjam serta hal yang berkenaan dengan proses administratif. Sebaliknya bagi responden yang beranggapan sikap pelaksana rendah menyatakan bahwa jarang sekali ada pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Petugas hanya mementingkan pada aspek finansial semata tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosil masyarakat. Pemberdayaan ekonomi hanya dipahami sebatas pada pinjaman modal namun tidak dibarengi dengan upaya menciptakan pasar yang lebih baik. Aspek keadilan dalam pemberian pinjaman maupun pemberian sanksi tidak merata. Benturan kepentingan antara pengembangan lembaga menyebabkan segmen nelayan yang termiskin umumnya tidak menerima bantuan apapun dari program PEMP. Petugas bersedia melakukan tugas hanya karena diberi tanggung jawab kerja, tidak terkesan bahwa petugas mau memperhatikan masyarakat terlebih melakukan pendekatan secara psikologis sehingga tercipta jarak antara masyarakat dan petugas.

Rekapitulasi Data Variabel Komunikasi

No.	Kategori Jawaban	F	%
1.	Sangat tinggi	5	13,88
2.	Tinggi	8	22,22
3.	Kurang tinggi	17	47,22
4.	Rendah	6	16,66
	Jumlah	36	100

Sumber : diolah dari tabel III. 33

Berdasarkan pengolahan data dalam tabel III. 34 maka dapat diketahui bahwa komunikasi program diperoleh hasil rendah. Hal ini dapat dilihat dari 36 responden, 5 responden (13,88%) menjawab dengan kategori sangat tinggi, 8 responden (22,22%) menjawab dengan kategori tinggi, 17 responden (47,22%) menjawab dengan kategori kurang tinggi, dan 6 responden (16,66%) menjawab dengan kategori rendah.

Untuk responden yang menjawab dengan kategori tinggi beranggapan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh petugas terkesan baik dan bisa diterima oleh masyarakat pesisir, seperti bahasa yang digunakan, bentuk dan metode serta pemahaman petugas terhadap kondisi masyarakat. Sedangkan responden yang menyatakan dengan kategori kurang tinggi beranggapan bahwa metode yang dilakukan kurang tepat sehingga perlu dilakukan metode yang lebih efisien seperti misalnya mengadakan penyuluhan secara terbuka, berjangka dan teratur. Hal ini dapat dilihat pada intensitas sosialisasi program yang masih rendah dan jarang sekali dilakukan. Proses interaksi yang dilakukan oleh petugas juga

terkesan canggung sehingga informasi yang diterima oleh wajib pajak kurang optimal. Demikian pula keterangan-keterangan yang diberikan oleh petugas, mereka hanya memberikan informasi tentang batas waktu atau jatuh tempo pembayaran pinjaman sehingga keterlibatan masyarakat secara langsung didalam program PEMP terkesan terbatas. Akses pada sumber-sumber informasi menurut beberapa responden bersifat terbatas hanya pada golongan tertentu yang dinilai memiliki kelayakan usaha dan kemampuan mengembalikan pinjaman.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penyebab kurang maksimalnya implementasi program antara lain prosedur penyaluran pinjaman yang berjalan terlalu bersifat formal. Terbatasnya fasilitas yang tersedia turut memberikan kontribusi bagi kelancaran distribusi program, jauhnya jarak antara tempat pengajuan kredit dengan desa tempat tinggal, belum tersedia tempat-tempat disekitar desa yang memungkinkan mereka untuk mengakses pinjaman dengan lebih mudah. Kondisi rendahnya tingkat pendapatan merupakan faktor utama keterlambatan pengembalian pinjaman. Kaum nelayan dalam sekali melaut terkadang tidak mendapatkan hasil sama sekali, sementara harga bahan bakar melambung tinggi sehingga sulit untuk membayar tepat waktu. Penekanan pada kepentingan lembaga yang dilakukan koperasi LEPPM3 menjadikan distribusi program bias terhadap sasaran dan tujuan utama program.

2. Walaupun secara umum telah ada kemauan dari petugas untuk melakukan tugas sebagaimana yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan program namun pemahaman tersebut hanya dibatasi pada kepentingan institusional. Benturan kepentingan pengembangan lembaga menyebabkan segmen nelayan yang termiskin umumnya tidak menerima bantuan apapun dari program PEMP. Benturan kepentingan antara petugas dalam pengembangan lembaga koperasi penyalur dana PEMP secara tidak langsung menumbuhkan jarak dengan masyarakat sasaran program. Jarang sekali ada pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Petugas hanya mementingkan pada aspek finansial semata tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat. Petugas yang ada dirasa sangat kurang dibandingkan dengan jumlah masyarakat pesisir yang membutuhkan, petugas enggan terjun langsung kepada masyarakat dengan akses transportasi jauh dari tempat kantor koperasi nelayan berada sehingga terkesan mobilisasi petugas rendah. Dalam hal pinjaman, sikap petugas cenderung selektif terhadap warga masyarakat pesisir terlebih kepada yang dinilai tidak mampu, padahal sebagian masyarakat pesisir nelayan tidak menentu penghasilannya. Aspek keadilan dalam pemberian pinjaman maupun pemberian sanksi tidak merata, konsekuensi yang harus diterima petugas adalah pengabaian pada peraturan menjadi fleksibilitas yang kurang pro terhadap kaum pesisir miskin. Berbagai variasi masalah lokal seperti yang tercermin dalam pelaksanaan program di

kelurahan Tanjungmas menuntut adanya langkah proaktif pemerintah bagi tercapainya keberdayaan dan geliat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

3. Tingkat komunikasi yang dilakukan dalam implementasi program PEMP di Kelurahan Tanjungmas dapat dikatakan kurang baik. Akses pada sumber-sumber informasi bersifat terbatas hanya pada golongan tertentu yang dinilai memiliki kelayakan usaha dan kemampuan mengembalikan pinjaman. Bahwa memang belum ada penyuluhan secara terbuka yang dilakukan oleh pihak pelaksana kebijakan yang pernah mereka alami. Kemampuan petugas melakukan pendekatan hanya sebatas konseptual namun tidak dibarengi dengan aplikasi yang nyata kepada para responden. Dilihat dari intensitas sosialisasi program yang masih rendah dan jarang sekali dilakukan, informasi menurut para responden hanya diberikan pada saat adanya pertemuan-pertemuan besar yang melibatkan kehadiran para pejabat tinggi namun setelahnya hampir tidak ada sama sekali. Proses interaksi dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh petugas, hanya mengedepankan informasi tentang batas waktu atau jatuh tempo pembayaran pinjaman sehingga keterlibatan masyarakat secara langsung didalam program PEMP terkesan terbatas. Metode komunikasi yang dilakukan pada masyarakat pesisir Tanjungmas dinilai kurang tepat sehingga perlu dilakukan metode yang lebih efektif sehingga harmonisasi antara tujuan dan implementasi dapat tercipta dengan baik.

A. Saran

1. Kekakuan dan formalisme prosedur pinjaman modal usaha hendaknya disesuaikan dengan keadaan masyarakat atau bahkan dihilangkan sama sekali.
2. Tersedianya sarana infrastruktur yang representatif bagi terbukanya akses kredit masyarakat pesisir terpencil dan skala kecil.
3. Merumuskan kembali ukuran-ukuran yang jelas tentang agunan dan kelayakan usaha sebagai sebuah syarat realisasi pinjaman. Melakukan pengembangan produk pelayanan keuangan seperti asuransi pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat pesisir.
4. Tersedianya fasilitas jaringan komunikasi yang terstruktur dari tingkat kota hingga kelurahan sebagai jembatan informasi perkembangan aktivitas ekonomi. Mengoptimalkan fungsi struktur pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat untuk menunjang keberhasilan program.
5. Pemahaman yang lebih luas oleh petugas tentang pentingnya pemberdayaan bagi masyarakat pesisir tidak hanya sebatas pada aspek finansial dan pelaksanaan tugas-tugas rutin tetapi juga pemahaman yang menonjolkan aspek keberdayaan masyarakat pesisir sebagai sasaran sehingga tujuan utama program tetap konsisten dan terjaga.
6. Perlunya tindakan yang lebih proaktif dari petugas dalam menjalankan program. Pelaksana program diharapkan memiliki mobilitas yang tinggi

sehingga mampu mengurangi jarak antara petugas dan masyarakat yang letaknya jauh dari kantor pelayanan pinjaman.

7. Perlunya diadakannya penyuluhan secara berkala, rutin dan teratur. Dimana dalam pertemuan tersebut perlu untuk selalu disampaikan mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam program, tanya jawab maupun pemberitahuan informasi lainnya. Selain itu petugas penyuluhan juga harus berjalan dengan dua arah agar pemahaman terhadap program dapat benar-benar diterima oleh masyarakat.
8. Pengembangan lembaga penyalur kredit diharapkan tidak hanya menonjolkan aspek finansial tetapi juga mengedepankan epektifitas program dengan mengambil alih berbagai fungsi yakni antara lain fungsi produksi dan fungsi pemasaran. Pada fungsi produksi, koperasi mengambil peran sebagai penyedia faktor produksi penangkapan ikan seperti menyediakan biaya-biaya bekal operasi penangkapan ikan, penyedia alat tangkap ikan dan bahkan penyedia mesin motor tempel serta kapal penangkap ikan. Fungsi Pemasaran, dalam hal ini koperasi bisa membeli hasil laut tangkapan nelayan untuk kemudian disalurkan kembali ke pasar lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Dahuri, R. 2002. Kebijakan Dan Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan Dan Perikanan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka.

Departemen Perikanan Dan Kelautan. 2004. Keputusan Menteri Perikanan Dan Kelautan RI No 18 Tentang Program PEMP. Jakarta.

DKP Kota Semarang 2004. Profil PEMP Kota Semarang : Tim DKP Kota Semarang.

Dunn, William N. 1999. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : UGM Press.

Fauzi, A. 2005. Kebijakan Perikanan Dan Kelautan (Isu, Sintesis Dan Gagasan). Jakarta : PT Gramedia Pustaka.

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Effendi. 1981. Ilmu Komunikasi. Jakarta.

Hadi, S. Statistik II. Yogyakarta. 1993.

Islami, M. 1994. Kebijakan Publik. Jakarta : Universitas Terbuka.

Muhammad, A. 1995. Komunikasi Organisasi. Jakarta. Bumi Aksara.

Nasir, M. 1999. Metode Penelitian. Jakarta : Galia Indonesia.

Purnaweni, H. 1991. Diktat Untuk Kebijakan Publik : Suntingan Dari Implementing Public Policy, George Edward III : Semarang.

Sjahrir. 1987. Kebijaksanaan Negara : Konsistensi dan Impelementasi. Jakarta : LP3S.

Wahab, Solichin Abdul. 2002. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Sinar Grafika.

The Liang Gie. 1981. Unsur-unsur Administrasi. Yogyakarta : Super Sukses.

Winarno, Budi. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media pressindo.

Robin, S.P. 1996. Perliaku Organisasi Jilid II. Jakarta : Prehalindo.

Singarimbun, M dan Sofyan Efendy. 1989. Metode Penelitian Survey. Jakarta : LP3ES.

Soekanto, S. 1986. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : UI Press.

Steer, R.M. 1990. Efektivitas Organisasi. Jakarta : Erlangga.

Umar, H. Metode Penelitian Sosial. 2004. Jakarta : PT Grafindo Persada.